



BULETIN | EDISI I 2021

BANG AWAS !

MEDIA INFORMASI

BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



EKSISTENSI BAWASLU BABEL PASCA PILKADA 2020

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

bawaslu.babel



Daftar Isi

Judul Daftar Isi Dari Redaksi

Seputar SDM

**BAWASLU BABEL SIAP TERAPKAN LEMBAGA ZONA INTEGRITAS,
PREDIKAT WBK DAN WBBM JADI SASARAN UTAMA**

4

**BAWASLU BABEL SIAP TERAPKAN ZONA INTEGRITAS
HINGGA BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

6

**ZONA INTEGRITAS SEBAGAI
BAROMETER INTEGRITAS LEMBAGA**

7

**CEGAH PENYEBARAN COVID-19
JAJARAN BAWASLU BABEL RESMI DIVAKSIN**

9

Seputar Keuangan

**10 GELAR SOSIALISASI PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN,
EDI INGATKAN JAJARAN BAWASLU KELOLA ANGGARAN SESUAI ATURAN**

**11 JAJARAN BAWASLU BABEL GELAR RAPAT REALISASI
ANGGARAN 2020 SERTA PROGRAM KERJA 2021**

12 BAWASLU BABEL RAIH TIGA PENGHARGAAN PENILAIAN KEUANGAN

**13 GELAR RAPAT PERSIAPAN AUDIT INTERNAL,
BAWASLU BABEL BERHARAP RAIH HASIL TERBAIK**

Seputar Pengawasan

**14 BAWASLU BABEL RAIH TERBAIK KE-3
PENGGUNA APLIKASI SIWASLU**

15 BAPPENAS RI APRESIASI PROGRAM SKPP BAWASLU DI BABEL

16 PROGRAM "KULAT PELAWAN" DIHARAPKAN EFEKTIF DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN

**17 MENGENAL PROGRAM
KULAT PELAWAN BAWASLU BABEL**

Seputar Humas, Hubal & Datin

MESKI TANPA TAHAPAN PEMILU
Bawaslu Babel Tingkatkan Fungsi Kehumasan

18

KUNJUNGI BAWASLU BELITUNG
PIMPINAN BAWASLU BABEL PAPARKAN TARGET HUMAS

19

EDI MINTA BAWASLU BELTIM JAGA EKSISTENSI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

20

BAWASLU & UBB LAKUKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
Pemanfaatan Ruang Opini Publik Website Bawaslu Babel

21

Gelar Sosialisasi PPID Ke UBB,
Dewi Berharap PPID dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Akademik

22

Seputar Hukum

23 MESKI TANPA TAHAPAN PEMILU,
JAFRI INGATKAN JAJARAN BAWASLU JAGA RITME BEKERJA

24 KESIAPAN BAWASLU BABEL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU/PEMILIHAN
Firman Lakukan Sosialisasi SOP Ke Bawaslu Kabupaten/Kota

*Testimoni Stakeholders 25
Kartun SKPP 26
Berbagi Ramadhan 1442H*

Salam Redaksi

Asalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

SALAM BAWASLU !!!

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menganugrahkan kita kreatifitas dan pengetahuan yang baik dalam menuangkan segala informasi kedalam bentuk tulisan pada sebuah Buletin resmi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertajuk Bang Awas !, serta memberikan ide-ide cemerlang dan mampu menuliskannya dalam Buletin Bang Awas ! Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selama kurun waktu 2 tahun terakhir Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung konsisten menerbitkan Buletinnya dengan ide, gagasan, informasi dan desain yang kreatif, kali ini kembali kami meluncurkan Buletin Bang Awas ! Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edisi Pertama di Tahun 2021 dengan Tajuk "Eksistensi Bawaslu Babel Pasca Pilkada 2020".

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua tim dan anggota redaksi yang telah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan Buletin ini, karena seiring perkembangan struktur kelembagaan Bawaslu, kami dapat menerbitkan Buletin ini secara rutin setiap enam bulan sekali.

Tantangan mengumpulkan data Buletin di tengah Pandemi Covid-19 masih menjadi semangat dan rintangan tersendiri bagi Tim Humas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan peliputan dan dokumentasi disetiap kegiatan dan kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal tersebut tak menyurutkan semangat Tim Humas Bawaslu Bangka Belitung untuk menampilkan materi buletin yang menarik untuk disajikan kepada publik, bahkan untuk edisi kali ini kami tampilkan kembali segmen opini dan testimoni yang lebih menarik perhatian publik.

Pada akhirnya kami mengucapkan selamat membaca dan selamat menikmati informasi yang telah kami rangkum dalam buletin ini.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.
Wassalamualaikum WR.WB.

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB : Edi Irawan, S.Ag, M.H. | **REDAKTUR :** Dewi Rusmala, S.Pd. M.Pd.,
Andi Budi Yulianto, ST., Ir. Firman T.B. Pardede, Jafri, S.Pd.Si. | **EDITOR :** Roy M Siagian, S.Sos, M.Si.,
Hilton Tampubolon, SE | **DESAIN GRAFIS :** Dedy Mulia, S.Si | **FOTOGRAFER :** Musri Agustian |
PENULIS ARTIKEL : Jazzkyanda, Syahril, Rifky Riswan Tanjung |
ALAMAT REDAKSI : Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Mendanau No. 2 Air Itam Pangkalpinang, Indonesia

BULETIN | EDISI I 2021

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di halaman Kantor Bawaslu Babel. Langkah ini sebagai tindak lanjut dari keputusan Bawaslu RI kepada Bawaslu Babel, yang menjadikan Bawaslu Babel sebagai salah satu dari 13 provinsi sebagai pilot project penerapan pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM, di

kinerja Bawaslu Babel dan rekan-rekan secara ikhlas dan bertanggung jawab,” ucap Edi Irawan Ketua Bawaslu Babel saat menyampaikan sambutannya.

Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM oleh Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan dan diikuti oleh empat orang komisioner Bawaslu Babel



Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan saat memberi sambutan terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM bagi Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

BAWASLU BABEL SIAP TERAPKAN LEMBAGA ZONA INTEGRITAS, PREDIKAT WBK DAN WBBM JADI SASARAN UTAMA

unit kerja Bawaslu provinsi, “Ini merupakan tindak lanjut keputusan Bawalslu RI kepada Babel salah satu dari 13 pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM, ketetapan ini tidak diberikan serta merta, tentu berdasarkan penilaian indikator

lainnya.

Bahkan Kapolda Babel Irjen (Pol) Anang Syarif Hidayat, bersama dengan Ketua KPU Babel, Kejaksaan Tinggi, Ombudsman dan perwakilan Korem 045 Garuda Jaya, juga turut menandatangani pencanangan pembangunan Zona

Integritas menuju WBK dan WBBM tersebut.

Edi mengatakan, seremoni kegiatan tersebut merupakan tahapan penting yang harus mereka lakukan dalam membangun Zona Integritas. Hal ini sekaligus menunjukan Bawaslu bersikap transparan terhadap

segala bentuk kegiatan mereka sebagai lembaga pengawas pemilu.

“Langkah ini juga menjadikan lembaga pengawas Pemilu yang terpercaya di publik mengenai pengawasan, penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu secara professional, netral, transparan akuntabel sesuai asas pemilu,” ujar Ketua Bawaslu Babel ini.



Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Ketua Bawaslu Babel



Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Kapolda Babel



Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Kejaksaan Tinggi Babel



Penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM oleh Ketua KPU Babel

Dalam kesempatan itu Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen. Pol. Drs. Anang Syarif Hidayat juga memberikan apresiasinya kepada jajaran Bawaslu lantaran telah berkomitmen untuk mewujudkan Zona Integritas dilingkungan Bawaslu Babel hingga Bawaslu kabupaten/kota di Babel,

Kami tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bawaslu hari ini, harapan kami semua kegiatan pemilu dapat terselenggara dengan baik," kata Kapolda.

Usai melakukan penancangan Zona Integritas ini, Bawaslu Babel langsung membentuk Tim Zona Integritas (ZI) yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu Babel, Tim ZI ini membahas Action Plan dan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) di ruang rapat Bawaslu Babel.

Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah indikator mengenai syarat dan ketentuan suatu Lembaga mendapatkan predikat Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia,

"Hari ini kita membahas Action Plan dan Lembar Kerja Evaluasi, total ada 6 Indikator (area perubahan) yang harus dicapai secara maksimal untuk mendapatkan penilaian yang baik," ujar Rogrius Sub Koordinator SDM Bawaslu Babel saat menyampaikan paparannya, Selasa (04/05/2021).

Dalam rapat itu dibahas poin demi poin yang menjaga syarat mutlak suatu Lembaga sebagai Lembaga Zona Integritas, seperti Tim Kerja Zona Integritas, mekanisme Zona Integritas hingga data dukung yang dibutuhkan pada tiap indikator sebagai Lembaga Zona Integritas,

"Data dukung ini harus kita cermati, seperti mekanisme atau prosedur Zona Integritas, apakah perlu kita buat SOP atau cukup hanya mekanisme berupa alur menuju Zona Integritas saja," ucap Yaumil Ikrom Kabag P3SPH Bawaslu Babel yang juga merupakan Ketua Tim ZI Bawaslu Babel ini.

Rapat inipun direspon positif oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Babel Roy M Siagian yang menginginkan adanya Kerjasama yang baik pada Tim ZI ini dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan,

"Saya sepakat apa yang dikatakan oleh teman-teman, sebaiknya kita

punya target seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang jadi ada area prioritas yang harus dilakukan," ujarnya.

Ia melanjutkan arahnya yang menginginkan agar Tim ZI Bawaslu Babel ini bekerja bersama dan saling memberikan masukan agar indikator ZI ini lebih terukur dalam memperoleh predikat (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).

Menjelang akhir Bulan Mei Tahun 2021 Tim Zona Integritas Bawaslu Babel mulai melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi terhadap Action Plan Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Babel.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim ZI ini dilakukan dengan memetakan seluruh indikator pada Action Plan Pembangunan Zona Integritas, "Kita harapkan pelaksanaan ZI ini menjadi momen perubahan untuk lembaga kita, sehingga menjadi rutinitas lembaga kita," ucap Yaumil Ikrom selaku Ketua Tim ZI Bawaslu Babel. Guna memenuhi Indikator Action Plan Pembangunan Zona Integritas ini Tim ZI Bawaslu Babel juga sudah melakukan sejumlah agenda seperti melakukan sosialisasi budaya kerja dan komitmen pelayanan kepada seluruh pegawai dan pimpinan Bawaslu Babel.



Foto Bersama Sesai Penandatanganan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Ketua dan Anggota Bawaslu Babel dan Jajaran Forkopimda Babel



13 Tahun Bawaslu Mengawasi

Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan (tengah) saat memberi arahan terkait Pembangunan Zona Integritas di ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Babel

BAWASLU BABEL SIAP TERAPKAN ZONA INTEGRITAS HINGGA BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dinilai layak menjadi sampel Zona Integritas Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia, terlebih lagi indikator-indikator penilaian Zona Integritas sudah dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan selanjutnya Bawaslu Babel siap terapkan pembangunan Zona Integritas hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Terkait sosialisasi ini, kalau kita melihat indikator penilaian birokrasi yang bersih dan melayani tentu sepantasnya kita Bawaslu berhak, karena dari indikator cerminannya sudah bisa diukur terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran,” ujar Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan saat menyampaikan sambutan dalam sosialisasi Zona Integritas oleh Bawaslu RI di ruang rapat Bawaslu Babel.

Menurut Ketua Bawaslu Babel ini, Bawaslu Babel selalu mengedepankan Lembaga yang bebas korupsi, hal itu bisa dibuktikan dengan capaian 100 persen kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) Pimpinan Bawaslu dan Pejabat Struktural di lingkungan Bawaslu Babel selama 3 Tahun berturut-turut.

Sementara Koordinator Organisasi dan Fasilitas Reformasi Birokrasi Abdul Rahman Mansyur memaparkan bahwa untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Bawaslu harus memenuhi sejumlah indikator seperti menyusun rencana aksi, melaksanakan rencana aksi, hingga melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian pelaksanaan rencana aksi.

Sejumlah indikator tersebut juga dijabarkan Anggota Bawaslu Babel Dewi Rusmala yang

menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan

Bawaslu menuju Zona Integritas yang bebas dari korupsi, karena seluruh data-data terutama yang berkaitan dengan anggaran telah dipublikasikan melalui website PPID Bawaslu Babel, “Informasi ke PPID sudah kami publikasikan, harapannya masyarakat bisa tahu bahwa Bawaslu selalu terbuka meskipun aturannya ada beberapa informasi yang dikecualikan,” jelas Anggota Bawaslu Babel ini.

Diakhir sosialisasi Ketua Bawaslu Babel meminta agar jajaran Bawaslu Babel senantiasa berkoordinasi dengan Tim Fasilitas Reformasi Birokrasi Bawaslu RI guna menciptakan Zona Integritas dilingkungan Bawaslu Babel.



Peserta kegiatan rapat sosialisasi Zona Integritas Bawaslu Babel

ZONA INTEGRITAS SEBAGAI BAROMETER INTEGRITAS LEMBAGA

Oleh :

ROY M SIAGIAN, M.Sos. M.Si.

(Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)



Korupsi merupakan salah satu penyebab keroposnya sendi bernegara. Kerapuhan sendi itu menyentuh aspek ketertutupan ruang pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pelayanan ala kadarnya sering dijumpai sebagai cerminan dari buruknya penataan kualitas birokrasi pada masa Orde Baru karena begitu kuatnya cengkeraman dan sikap Asal Bapak Senang (ABS). Kondisi korupsi di Indonesia masuk dalam kategori kronis dari waktu ke waktu. Karena secara umum sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih belum berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance). Oleh karenanya tidak mengherankan bila Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berdasarkan survei Transparansi Internasional, memperoleh indeks pada kisaran angka 2 dari tahun 2004 hingga tahun 2007 (Setiawan, 2014). Angka indeks ini tetap pada porsi yang mengkhawatirkan sampai dengan tahun 2020, dimana angkanya melorot 3 poin dari 40 pada tahun 2019 menjadi 37 pada 2020. Hal ini menyebabkan Indonesia masuk dalam urutan 102 dari 180 negara

dengan indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. IPK hingga saat ini diyakini sebagai pendekatan yang sah untuk melihat tingkat korupsi di suatu negara (www.setneg.go.id).

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia (Inpres Nomor 10 Tahun 2016) menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 dan 2020-2024.

Berbagai upaya pencegahan sebenarnya telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan perizinan, seperti yang dicontohkan beberapa daerah melalui pembentukan one stop service (layanan satu atap). Namun, dalam implementasinya, persepsi masyarakat masih mencerminkan adanya kelemahan, terutama menyangkut regulasi perizinan di daerah yang meninggalkan sekian celah bagi korupsi.

Dalam rangka memberikan apresiasi kepada top manajemen yang memiliki komitmen terhadap pencegahan korupsi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi yang diperbaharui dengan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. K/L/Pemda yang telah mencanangkan kesiapan/kesanggupan menjadi K/L/Pemda yang berpredikat ZI mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan K/L/Pemda yang bersangkutan.

Zona Integritas, Apakah Itu?

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. K/L dan Pemda yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Untuk menjadikan unit kerja sebagai WBK/WBBM harus memenuhi enam indikator hasil (area perubahan) yang akan dinilai oleh Tim Penilai Internal (TPI) kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional. Untuk WBK dan WBBM ditetapkan oleh Menpan dan RB. Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM, apakah pekerjaan telah usai? jawabannya adalah tidak. Pemberian predikat WBK/WBBM bukan merupakan akhir dari proses, karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun, dan apabila hasil evaluasi tersebut terdapat penilaian indikator yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kriteria, maka predikat WBK/WBBM tersebut dicabut.

Lalu bagaimana hubungannya dengan Zona Integritas (ZI)? Kalau kita menganalogikan ZI adalah sebuah pulau, maka unit kerja yang telah mendapat predikat WBK/WBBM adalah sebuah daerah di pulau tersebut. Kapan pulau tersebut menjadi Zona Integritas atau disebut juga *Island of Integrity*? Zona Integritas di pulau tersebut dapat tercapai apabila seluruh daerah di pulau tersebut telah menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Permenpan 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tidak mengatur bagaimana pembentukan Zona Integritas. Permenpan tersebut hanya mengatur bagaimana menjadi WBK/WBBM, seolah dengan menjadi WBK/WBBM maka Zona Integritas telah terbentuk dan Zona Integritas cukup dengan pencanangan.

Zona Integritas adalah tujuan akhir bukan WBK atau WBBM, WBK atau WBBM adalah proses, suatu cara untuk menjadikan K/L/Daerah menjadi sebuah *Island of Integrity* atau Zona Integritas. Unit kerja yang telah menjadi WBK/WBBM harus menjadi *pilot project* dan *benchmark* untuk unit kerja lainnya. Unit kerja tersebut diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jangan lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-pesanan tertentu dari pihak manapun, berikan reward dalam bentuk tunjangan/remunerasi yang lebih dibanding lainnya.

Bawaslu Babel sebagai Sampel ZI

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), telah menetapkan ZI di lingkungan Bawaslu. Ketua Bawaslu telah mengeluarkan surat Nomor: 0109/OT.05/K.1./04/2021 Tentang Penetapan Unit Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021. Dengan adanya surat tersebut, Bawaslu Kep. Babel dan jajaran telah bersiap untuk berbanah dan memperbaiki diri. Emplate terkait dengan ZI tentunya menyentuh berbagai aspek. Adapun beberapa area perubahan yang masuk dalam penilaian adalah Area 1 Manajemen

perubahan, Area 2 Penataan Tatalaksana, Area 3 Penataan Manajemen SDM, Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Area 5 Penguatan Pengawasan, dan Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam mendukung keseriusan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Kep. Babel dalam meraih WBK ini dilakukan pencanangan Zona Integritas yang berlangsung pada Kamis (29/4), dihadiri oleh Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Perwakilan Korem Garuda Jaya 45 Kepulauan Bangka Belitung, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara (KPPN) Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang dan Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung.

Pencanangan yang dilakukan ini sebagai bentuk deklarasi dimulainya Gerakan pembangunan ZI yang ada pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menuju WBK. Pertaruhan dalam meraih gelar WBK ini adalah titik penting untuk menghadirkan jajaran Pengawas Pemilu yang berintegritas, bermartabat dan juga mampu melayani masyarakat dengan baik. Semoga dengan pencanangan dan implementasi ZI yang sedang dilakukan ini Bawaslu Kep. Babel mampu meraih WBK dan kelak WBBM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen bersih, anti korupsi dan sekaligus melayani dengan sepenuh hati.



CEGAH PENYEBARAN COVID-19 JAJARAN BAWASLU BABEL RESMI DIVAKSIN

Foto bersama Anggota Bawaslu Babel dan Jajaran Sekretariat Bawaslu Babel setelah melakukan vaksin Covid-19

Guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), jajaran Bawaslu Babel hari ini resmi divaksin. Vaksinasi Covid-19 ini diberikan kepada jajaran Bawaslu Babel mulai dari Pimpinan Bawaslu, Pejabat Struktural, hingga Staf Sekretariat di lingkungan Bawaslu Babel.

“Alhamdulillah hari ini Bawaslu Babel telah divaksin Covid-19 untuk pertama kali, mulai dari Pimpinan, Struktural dan Staf sudah divaksin, kecuali kondisinya tidak memungkinkan maka vaksinasinya ditunda,” kata Roy M

Siagian Kepala Sekretariat Bawaslu Babel saat dikonfirmasi Tim Humas Bawaslu Babel.

Sementara Anggota Bawaslu Babel Dewi Rusmala yang mendapatkan vaksin untuk pertama kali hari ini mengaku senang bisa divaksin, ia menilai langkah ini merupakan pencegahan penularan Pandemi Covid-19 terutama di lingkungan Bawaslu Babel, “Menurut saya ini sangat bagus untuk antisipasi terpapar Covid-19, karena Covid ini tidak terlihat, jadi kita hanya bisa mencegah dan menjaga kebersihan diri kita,” ucap Anggota Bawaslu Babel ini.

Begitu juga dengan 3 (tiga) Anggota Bawaslu Babel lainnya

yakni Firman T.B. Pardede, Jafri dan Andi Budi Yulianto yang melakukan vaksinasi di waktu berbeda menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya atas program vaksinasi yang diselenggarakan untuk seluruh jajaran Bawaslu Babel mulai dari Pimpinan, Pejabat Struktural hingga Staf Sekretariat.

Vaksinasi ini rencananya akan dilakukan sebanyak 2 kali yakni hari ini tanggal 03 Maret dan tanggal 17 Maret 2021, hal ini agar pemberian vaksin mendapatkan hasil maksimal yang dilakukan secara bertahap, sementara jajaran Bawaslu Babel yang belum sempat divaksin akan dijadwalkan untuk melakukan vaksin pada tanggal 09 Maret 2021 mendatang.



Vaksin Covid-19 oleh Anggota Bawaslu Babel



Pengecakan sebelum di vaksin



Pengecakan sebelum di vaksin



Vaksin Covid-19 oleh Anggota Bawaslu Babel



Proses pendaftaran vaksin Covid-19 oleh staf sekretariat Bawaslu Babel

Bawaslu Mengawasi

GELAR SOSIALISASI PEDOMAN ADMINISTRASI KEUANGAN, EDI INGATKAN JAJARAN BAWASLU KELOLA ANGGARAN SESUAI ATURAN

Kepala Sekretariat Bawaslu Babel Roy M Siagian (kanan), saat menyampaikan arahan terkait Pedoman Administrasi Keuangan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung

Guna meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 serta penyesuaian dengan ketetapan dan peraturan yang baru, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar Sosialisasi Pedoman Administrasi Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.

Dalam sosialisasi tersebut, Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan meminta agar jajaran Bawaslu di Babel dapat menggunakan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku, "Untuk dapat menyiasati keterbatasan anggaran dengan melakukan kegiatan yang menggunakan anggaran ataupun

tidak menggunakan anggaran dan tetap memberikan yang terbaik, namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Edi Irawan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Babel Roy M Siagian dalam kesempatan itu juga menyampaikan arahnya agar jajaran Bawaslu kabupaten/kota tidak melakukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran, "Sebagai tindak lanjut dari BPK yang disampaikan oleh Bawaslu RI harus menjadi perhatian untuk Babel agar tidak melakukan kesalahan atau menyalahi aturan keuangan dalam penggunaan anggaran," ujar Roy.

Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan melanjutkan paparannya, bahwa permintaan penggunaan anggaran secara tepat dan akurat

ini bukan tanpa alasan, mengingat pada Tahun 2020 lalu Bawaslu Babel masuk kategori tertib Laporan LHKPN dan menduduki peringkat ke-3 tercepat.

"pada pengelolaan anggaran Pemilihan Tahun 2020, kita juga termasuk dalam kategori terbaik kedua yaitu kategori dibawah 40 miliar rupiah, semoga ini bisa dimaksimalkan," terang Edi.

Terakhir Edi menyampaikan, apabila kabupaten/kota memiliki inovasi untuk program yang akan dilakukan, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Kepala Sekretariat atau Koordinator Sekretariat masing-masing agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang ada.

Peserta Kegiatan Sosialisasi Pedoman Administrasi Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, di Ruang Rapat Kantor Sekretariat Bawaslu Babel.



JAJARAN BAWASLU BABEL GELAR RAPAT REALISASI ANGGARAN 2020 SERTA PROGRAM KERJA 2021

Jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat realisasi anggaran 2020 dan sekaligus sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan dan anggaran Tahun 2021 bersama pimpinan Bawaslu Babel di ruang rapat Bawaslu Babel. Rapat dipimpin oleh Ketua Bawaslu Babel dengan membahas sejumlah hal mulai dari realisasi anggaran Tahun 2020 hingga pembahasan mengenai program kerja, kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan Bawaslu Babel Tahun 2021.

- Mengawali pembahasan dalam rapat tersebut Kepala Sekretariat Bawaslu Babel menyampaikan terkait “realisasi dan penyerapan anggaran rupiah murni mencapai 89.67 persen dan realisasi penyerapan dana hibah

mencapai 90.08 persen.

Kepala Sekretariat Bawaslu Babel ini juga menyampaikan bahwa realisasi dan penyerapan belanja pegawai mencapai 87 persen, realisasi dan penyerapan belanja barang mencapai 90 persen serta realisasi dan penyerapan belanja modal mencapai 97 persen.

Merespon yang disampaikan Kepala Sekretariat Bawaslu Babel tersebut Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan mengapresiasi capaian realisasi anggaran Bawaslu Babel Tahun 2020, dan berharap capaian ini bisa ditingkatkan demi memberikan pelayanan administrasi terbaik Bawaslu Babel, “PPK dan Bendahara Pengeluaran ada penyegaran, semoga ke depan bisa lebih baik dalam melakukan

pelayanan administrasi keuangan”, ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Anggota Bawaslu Babel Dewi Rusmala, Andi Budi Yulianto, Firman T.B. Pardede dan Jafri, masing-masing mengapresiasi dan memberi mulai dari pemetaan program tahun 2021, program kerja tahun 2021 hingga peningkatan penyerapan anggaran tahun 2021.

Lebih jauh rapat ini membahas terkait total pagu anggaran tahun 2021 Bawaslu Babel yang mencapai 21.802.194.000 rupiah terbagi tiga yakni Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum, Bagian Administrasi, serta Bagian Pengawasan dan Humas.

BAWASLU BABEL RAIH TIGA PENGHARGAAN PENILAIAN KEUANGAN

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam 3 kategori penilaian, yakni peringkat ke 2 penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK), peringkat ke 2 Pengelolaan Anggaran dibawah 40 miliar dan peringkat ke 4 Laporan Keuangan Tahun 2020.

Raihan penghargaan ini diperoleh Bawaslu Babel saat jajaran Sekretariat Bawaslu Babel menghadiri Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Tahun 2020 di The Singhasari Resort Malang, Jawa Timur pada Tanggal 15 hingga 17 Februari 2021,

“Alhamdulillah, Babel hari ini

berhasil raih 3 penghargaan sekaligus, bahkan untuk laporan keuangan Babel naik 5 peringkat dari Semester 1 Tahun 2020 yang hanya peringkat ke 9,” terang Roy Kepala Sekretariat Bawaslu Babel melalui pesan whatsappnya.

Atas penghargaan ini Kepala Sekretariat Bawaslu Babel menyampaikan apresiasi dan terimakasihnya kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Babel dan Bawaslu kabupaten/kota di Babel beserta jajaran struktural dan pengelolaan keuangan atas kinerja dan kerja keras jajaran Sekretariat Bawaslu di Babel,

“Saya ucapkan terimakasih kepada Bapak Ibu Pimpinan Bawaslu Provinsi hingga kabupaten/kota, Kepala Sekretariat dan Koordinator

Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, Kabag dan Kasubbag serta teman-teman atas dukungan dan kerjasamanya terkhusus pengelola keuangan yang sudah bekerja dengan baik,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya Bawaslu Babel juga berhasil meraih penghargaan sebagai lembaga informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik dan peringkat ketiga penggunaan aplikasi Siwaslu dari Bawaslu Se-Indonesia.

Dengan raihan sejumlah penghargaan ini menambah prestasi Bawaslu Babel dalam pengelolaan tata kelola organisasi sebagai Lembaga Pengawas Pemilu di Bangka Belitung.



Photo Kepala Sekretariat Bawaslu Babel, Roy M Siagian dengan Sekretaris Jendral Bawaslu RI Bapak Gunawan Suswantoro saat menerima 3 Penghargaan Penilaian Keuangan dari Bawaslu RI

BADAN PENGAWAS PE

PROVINSI KEP. BANGKA BELITUN



Ketua Bawaslu Babel di dampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Babel (tengah) saat memberi arahan terkait Persiapan Audit Internal di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Babel, Rabu (02/06/2021).

GELAR RAPAT PERSIAPAN AUDIT INTERNAL, BAWASLU BABEL BERHARAP RAIH HASIL TERBAIK

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat dalam kantor terkait dengan pelaksanaan audit operasional atas pengelolaan dana APBN dan dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di ruang rapat kantor Sekretariat Bawaslu Babel.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Babel beserta staf Sekretariat Bawaslu ini dilakukan guna persiapan hal apa saja yang dibutuhkan terkait pelaksanaan audit nanti. "Sehubungan dengan pelaksanaan audit operasional atas pengelolaan dana APBN dan dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021, Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat memenuhi seluruh data yang dibutuhkan dalam pemeriksaan. "Kita sebagai lembaga negara yang menggunakan uang negara, walaupun hanya 1 rupiah wajib dipertanggungjawabkan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku", ucap Edi Irawan selaku Ketua

Bawaslu Babel saat menyampaikan sambutannya.

Pada kesempatan yang lain, Kepala Sekretariat Bawaslu Babel Roy M Siagian menyampaikan beberapa hal terkait kelayakan Bawaslu Babel mendapatkan penghargaan. "Kami berusaha semaksimal mungkin agar hasil audit nanti dapat meninggalkan catatan yang baik, terlebih Bawaslu Babel sebelumnya telah mendapatkan 2 (dua) penghargaan, yaitu Peringkat 2 (dua) Penilaian IKPA dan peringkat 4 (empat) dalam Pengelolaan Keuangan, sehingga kita memang layak mendapatkan penghargaan tersebut apabila hasil audit kita baik", pungkas Roy. "Dia berharap kepada seluruh PPK khususnya yg mengelola dana hibah yang cukup besar, yang mana di dalamnya juga ada dana Covid untuk memeriksa kembali berkas-berkas administrasinya selagi masih ada waktu, karena auditor memeriksa berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan yang nilainya subjektif berdasarkan aturan yang dipahami oleh pemeriksa", Lebih lanjut dia berharap Bawalu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota kerja

sama secara simultan dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. "Sekali lagi tolong direviu, jika ada kekurangan mohon segera dilengkapi, tanda tangan yang belum ada tolong diperhatikan." Kita juga harus menyiapkan argumentasi yang logis serta dokumen pendukung bila ada hal-hal yang dipertanyakan oleh pemeriksa", ucapnya.

"Terkait BMN, sensus sudah dilakukan dan data-datanya lengkap, sehingga memang wajar kita dapat peringkat 1 (satu) dalam pengelolaan BMN tahun lalu. "Dari hasil monev BMN yang telah dilakukan oleh tim provinsi, secara menyeluruh masih terdapat administrasi BMN yang belum rapi, serah terima diantara pengurus barang dengan yang bersangkutan (pengguna barang) harus jelas, menggunakan berita acara dan administrasi lainnya dilengkapi", "Pada audit kali ini belum tahu apakah nanti BMN juga ikut diperiksa secara detail atau tidak, namun biasanya setiap ada audit BMN juga masuk didalamnya.", tutup Kepala Sekretariat Bawaslu Babel ini.



Anggota Bawaslu Babel Andi Budi Yulianto (Kanan) saat menerima penghargaan Pengguna Sistem Aplikasi Pengawas Pemilu (SIWASLU) Pilkada serentak Tahun 2020 oleh Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo

BAWASLU BABEL RAIH TERBAIK KE - 3 PENGGUNA APLIKASI SIWASLU

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih peringkat ke-3 Pengguna Sistem Aplikasi Pengawas Pemilu (SIWASLU) pada penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020.

Pengumuman penerangan ini disampaikan langsung dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pelaksanaan Pusat Pendidikan Partisipatif (SKPP) Tahun 2021, di Malang pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2020.

Anggota Bawaslu Babel Andi Budi Yulianto mengucapkan syukur dan terimakasih atas prestasi yang diraih jajaran Bawaslu, menurutnya hasil ini merupakan kerja keras bersama untuk menjalankan arahan yang disampaikan Bawaslu RI sebaik mungkin,

“Alhamdulillah, terima kasih

kepada Bawaslu RI atas kepercayaan ini, tentu ini semua tak lepas dari usaha dan kerja keras bersama jajaran Bawaslu dan keluarga besar Bawaslu Babel,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubal ini.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada jajaran Adhoc Bawaslu di Bangka Belitung terutama Pengawas TPS dan Pengawas Kelurahan Desa yang merupakan *leading sektor* dalam melakukan input data SIWASLU, “Terima kasih semoga ini menjadi salah satu motivasi kita untuk terus menjadi lebih baik,” ujarnya.

Sementara dilokasi berbeda Kepala Sekretariat Bawaslu Babel Roy M Siagian juga berterimakasih dan menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih jajaran Bawaslu Babel,

“Terima kasih atas prestasi yang diraih oleh Bawaslu Babel, semoga ini bisa

menjadi salah satu penyemangat bagi jajaran Bawaslu di Provinsi Babel untuk terus meningkatkan kinerja dalam melakukan dukungan pengawasan pemilu”, kata Roy.

Diketahui SIWASLU merupakan sistem pengawasan pemilu berupa perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam proses hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan.

Melalui SIWASLU pengawasan secara berjenjang dapat lebih mudah dilakukan, terlebih lagi sistem ini cepat terkonsolidasi secara nasional. SIWASLU juga menyajikan dokumen digital hasil rekapitulasi masing-masing tingkatan secara sistemik.



Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan (tengah) di dampingi Anggota Bawaslu Babel dan Kepala Sekretariat Bawaslu Babel saat menerima kunjungan dari Tim Bappenas Republik Indonesia (RI) di Ruang Ketua Bawaslu Babel Jumat, (11/06/2021).

BAPPENAS RI APRESIASI PROGRAM SKPP BAWASLU DI BABEL

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menerima kunjungan Tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Kunjungan Tim Bappenas RI ini dalam rangka melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Program Nasional Bawaslu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). “Kami hadir disini untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian program nasional yang akan dilaksanakan ini, seperti melakukan pemantauan dan pengendalian apakah program ini sudah tepat sasaran,” ucap Zakia Ayu Staf Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas RI.

Dalam paparannya ia memberikan apresiasi kepada Bawaslu Babel lantaran secara keseluruhan program nasional SKPP ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, hal ini dapat dinilai dari persiapan program yang dinilainya sudah memenuhi standart dari Program Nasional. Ia juga menyampaikan sejumlah catatan terhadap program nasional SKPP ini yang menyasar 5 titik pada 5 kabupaten di Bangka Belitung. Menurutnya akan lebih baik apabila program SKPP ini dapat berjalan di seluruh kabupaten/kota di Bangka Belitung meskipun 2 titik lainnya belum dapat di lakukan serentak secara nasional, “Dari hasil diskusi SKPP ini dilaksanakan 5 titik, saya mencoba bertanya apakah ada

solusi untuk 2 titik lagi agar program ini dapat berjalan maksimal,” paparnya. Ia menyampaikan masukannya terhadap program nasional SKPP Bawaslu agar setiap alumni SKPP dapat tetap berkontribusi mensosialisasikan Pendidikan politik kepada publik, “akan lebih baik alumni tetap continue memberikan Pendidikan politik ini, jadi tidak harus mereka menjadi peserta SKPP,” ujar Staf Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas RI ini.

Staf Bappenas RI ini berpesan agar Bawaslu Babel memikirkan percepatan realisasi program SKPP agar pelaksanaannya tetap pada jadwal yang sudah ditentukan, terlebih lagi kegiatan ini dilakukan pada masa pandemi Covid-19.



Photo bersama Anggota Bawaslu Babel Divisi Pengawasan dan Hubal, Andi Budi Yulianto (tengah), Kepala Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Babel serta staf Sekretariat Bawaslu Babel dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pangkalpinang dan peserta Kulat Pelawan, di ruang pertemuan SMA Negeri 3 Pangkalpinang.

PROGRAM “KULAT PELAWAN” DIHARAPKAN EFEKTIF DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melaksanakan program kegiatan pengawasan partisipatif dalam rangka mensosialisasikan Kulat Pelawan (Kuliah dan Pelatihan Pengawasan serta Pengenalan Wawasan Kepemiluan) kepada sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bangka Belitung.

Anggota Bawaslu Babel Andi Budi Yulianto selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan

antar Lembaga, dalam sambutannya Andi berharap kegiatan Kulat Pelawan ini dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada adik-adik terkait kepemiluan agar menjadi pemilih yang cerdas serta ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

Andi mengatakan Kulat Pelawan ini sebenarnya kita angkat dari kearifan lokal dari salah satu makanan khas Kepulauan Bangka

Belitung yang lebih dikenal dengan Jamur Pelawan, keberadaannya sekarang sudah hampir punah atau langka, sekarang mungkin hanya ada di Desa Namang Bangka Tengah, padahal harganya sangat mahal.

“Seperti keberadaannya sekarang, kulat ini sangat langka yang dulunya banyak sekarang

menjadi langka, begitu juga dengan keberadaan adik-adik yang sekarang langka dalam hal pengetahuan kepemiluan”, ungkap Andi.

Ia berharap kegiatan Kulat Pelawan ini bermanfaat menjadi cikal bakal kader SKPP dan berharap ilmu yang di dapat hari ini bisa di transfer kepada teman-teman di sekolah masing-masing, kedepannya disaat melakukan hak pilihnya nanti adik-adik bisa memilih calon yang sesuai dengan harapan.

“Kalau bisa semua masyarakat melakukan pengawasan partisipatif, semakin banyak yang mengawasi maka semakin kecil orang-orang yang melakukan kecurangan,” tutup Andi.

Selain itu kegiatan ini juga diharapkan agar pemilih pemula bisa menjadi pemilih dan pengawas, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu saja tapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat yang memiliki hak pilih termasuk siswa-siswi sebagai pemilih pemula.

“Semoga program Kulat Pelawan ini kedepannya bisa menjadi salah satu program efektif Bawaslu Babel dalam upaya-upaya konkrit pencegahan pada setiap moment kepemiluan,” pungkasnya.



Perwakilan Siswa-siswi SMA dan SMK se-Kabupaten Bangka Tengah, antusias saat mengikuti kegiatan “Kulat Pelawan” di SMAN 3 Koba, Bangka Tengah



Kepala Bagian Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Babel, Hilton Tampubolon di saat memberikan arahan terkait kegiatan “Kulat Pelawan” di SMAN 3 Koba Bangka Tengah

MENGENAL PROGRAM KULAT PELAWAN BAWASLU PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG

Oleh :

RIFKY RISWAN TANJUNG, S. Sos.

(Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)



Berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 khusus di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan hasil evaluasi yang cukup menarik terutama hal – hal yang menyangkut proses pendidikan politik kepada masyarakat dalam rangka mencegah dugaan pelanggaran. Evaluasi ini memberikan jawaban bahwa kegiatan pendidikan politik dalam rangka menciptakan masyarakat yang “Sadar Pengawasan Partisipatif” harus terus dilaksanakan secara rutin berupa Kegiatan pengawasan partisipatif meskipun dalam kondisi tanpa penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu secara inovatif Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggagas Program Kulat Pelawan (Kuliah dan Pelatihan Serta Pengenalan Wawasan Kepemiluan). Program Kulat Pelawan ini telah dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu di Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang pada bulan April – Mei Tahun 2021.

Pengambilan ide Program “Kulat Pelawan” merupakan sebuah program yang memberikan pendidikan politik dan wawasan kepemiluan sebagai wadah pusat pendidikan politik dan pembangunan sumber daya manusia (kaderisasi) cikal bakal pengawas pemilu secara struktural ataupun secara partisipan. Pembentukan Kader Pengawasan ini memiliki tujuan yang ideal yaitu untuk menjadi “cikal bakal” dari “Pengawas Pemilu” yang akan menjadi bagian dari Bawaslu dari sisi struktural ataupun dari sisi partisipan di lapangan. Sasaran peserta program ini adalah pemuda dengan rentan usia 16 tahun / Siswa / i SMA/MA/SMK/Sederajat atau yang belum memiliki hak pilih. Calon Pemilih pemula ini harus dibekali keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan rasa cinta tanah air sebagai dasar pengawasan partisipatif. Proses ini adalah bentuk pendidikan politik sejak

dini kepada calon pemilih pemula karena pemilih pemula adalah generasi bangsa Indonesia yang akan menjadi tonggak peradaban bangsa kemudian hari. Harapannya ketika pemilih pemula yang telah diberdayakan dalam pengawasan partisipatif akan “menularkan” pemahamannya kepada keluarga dan teman sebaya sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah secara berjejaring dan universal oleh masyarakat.

Filosofi Program Kulat Pelawan

Kulat Pelawan merupakan sebuah jamur khas wilayah Pulau Bangka dengan nama latin (*Hemioporus sp*) atau lebih dikenal oleh masyarakat Bangka dengan sebutan “Kulat Pelawan”. Kulat pelawan sebagaimana orang Bangka menyebutnya, bukanlah jamur sembarangan karena cara tumbuhnya tergolong sangat unik dan menarik. Proses produksi alamiah Kulat Pelawan dalam pertanian tradisional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipersyaratkan harus tumbuh di batang pohon Pelawan, dan harus dirangsang melalui sambaran petir. Perlu diketahui bersama bahwa batang pohon Pelawan saat ini sangat langka jarang ditemui, hanya tumbuh dua kali dalam setahun sehingga jamur ini menjadi sangat langka dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Hal ini tentu dikarenakan proses tergerusnya hutan – hutan pelawan dengan indstrusi dan modernisasi di wilayah pedesaan. Menariknya ini sama dengan halnya generasi muda yang bukan rahasia umum sangat langka ditemukan generasi muda yang memiliki ketertarikan terhadap Pemilu, Pilkada, dan pengembangan demokrasi untuk Indonesia. Bahkan mereka sangat rentan eksploitasi saat pemilihan karena ketidaktahuan mengenai nilai – nilai demokrasi yang luhur.

Hal tersebut merupakan sebuah persamaan dasar diadakannya pengawasan partisipatif bagi generasi muda yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dimasa mendatang. Mereka adalah generasi yang rentan eksploitasi oleh pihak yang bertanggungjawab saat pelaksanaan Pemilihan. Secara sosiologis pada masyarakat modern

saat ini khususnya kalangan generasi muda, sangat perlu disosialisasikan mengenai nilai – nilai demokrasi dan nilai – nilai luhur semangat perjuangan demi bangsa dan Negara.

Model Pembelajaran

Model pembelajaran ini menggunakan model kooperatif melalui pendekatan konstruktivisme. Menurut Bern dan Erickson “*Cooperative learning*” (pembelajaran kooperatif) merupakan strategi pembelajaran yang mengorganisir pembelajaran dengan menggunakan kelompok belajar kecil di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar. Lalu Pendekatan Konstruktivisme menurut Brooks adalah suatu pendekatan dalam belajar mengajar yang mengarahkan pada penemuan suatu konsep yang lahir dari pandangan, dan gambaran serta inisiatif siswa.

Mekanisme belajar dilakukan dengan pembentukan kelompok secara heterogen dan dilaksanakan di ruang kelas yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Fasilitator. Fasilitator mengenali kelas dengan membentuk kelompok kecil yang diisi oleh 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Siswa/i sekolah yang berbeda. Siswa/i akan diberikan pembelajaran dan pengenalan wawasan pengawasan pemilu, dan tentang kepemiluan serta praktik berupa simulasi sebagai pengawas pemilu sebagaimana kurikulum yang sudah dibuat oleh Bawaslu. Ada hal yang menarik dalam program ini adalah pada topik materi yang disampaikan yang di selipkan dengan studi kasus, mengenai persoalan demokrasi sehingga peserta dapat mengetahui problematika yang terjadi dengan hasil akhir dapat meningkatkan *social awareness* terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat menjadi “*embrio*” sebuah “*filantropi*” dimasyarakat. Memang suatu tujuan ideal yang akan lama tercapai, akan tetapi yakin dan percayalah pelanggaran pemilu juga dapat dicegah sejak dini dengan banyak cara yang di “halalkan” oleh Negara. Satu benih kebaikan menghasilkan jutaan pohon kebaikan pula dengan akar yang kuat apabila dirawat dengan baik. Ayo Mengawasi !.



Foto bersama team Kehumasan Bawaslu RI dengan Anggota Bawaslu Babel serta Kepala Sekretariat dan jajaran Bawaslu Babel

MESKI TANPA TAHAPAN PEMILU Bawaslu Babel Tingkatkan Fungsi Kehumasan

Guna menindaklanjuti Monitoring dan Evaluasi (Monev) kehumasan Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Bawaslu Babel menggelar Monitoring dan Evaluasi kehumasan kepada

jangan sampai publik beranggapan Bawaslu tidak bekerja,” ujar Anggota Bawaslu Babel Dewi Rusmala.

Ia menekankan agar Bawaslu Kabupaten/Kota lebih aktif dan variatif dalam mengelola platform media sosial resmi Bawaslu, karena

Siagian menyampaikan paparannya terkait dengan capaian Kehumasan Bawaslu Babel, “Masukan dari saya dan Pimpinan Bawaslu Babel untuk kedepannya website Bawaslu tidak saja menampilkan berita-berita terkait Bawaslu tapi bagaimana juga mempublikasikan stakeholder



Foto Anggota Bawaslu Babel Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin, Dewi Rusmala beserta staf Humas dan Hubal saat melakukan Monitoring Kehumasan di Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.

Monev ini menyasar pelaksanaan kehumasan Bawaslu kabupaten/kota seperti keaktifan media sosial resmi Lembaga, keaktifan berita yang dipublikasikan melalui website resmi Lembaga, hingga kendala dan target kehumasan Bawaslu kabupaten/kota selama Tahun 2021.

Hal ini dilakukan agar kehumasan Bawaslu di Bangka Belitung berjalan efektif meski tanpa tahapan Pemilu maupun Pilkada. “Ini menjadi tantangan tersendiri untuk kita bagaimana ditengah tidak adanya tahapan Pemilu, publik tetap tau apa saja yang dilakukan oleh Bawaslu,

menurutnya media sosial merupakan salah satu sarana publikasi yang efektif dan efisien bagi Bawaslu.

Untuk menunjang hal itu Sub Koordinator Humas dan Hubal Dedy Mulia menyampaikan sejumlah masukan dan perbaikan untuk Media Sosial dan pemberitaan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sejumlah hal yang perlu diperbaiki antara lain melengkapi profil media sosial, meningkatkan konten yang variatif di Media Sosial hingga pemberitaan lembaga di website resmi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sementara Kepala Sekretariat Bawaslu Babel Roy M

yang ikut berpartisipasi menyukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten/Kota” ucapnya.

Ia berharap jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota bisa mengidentifikasi kekurangan untuk mendukung PPID Bawaslu Babel,

Dengan terselenggaranya Monev ini diharapkan Bawaslu Kabupaten/Kota di Bangka Belitung dapat menerapkan hasil Monitoring dan Evaluasi kehumasan ini agar Humas Bawaslu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat berkembang sebagai sarana informasi yang cepat, tepat dan akurat bagi masyarakat.



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel (tengah) di dampingi Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belitung saat memberi arahan terkait Kehumasan di ruang rapat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belitung, Rabu (04/06/2021).

KUNJUNGI BAWASLU BELITUNG PIMPINAN BAWASLU BABEL PAPARKAN TARGET HUMAS

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menargetkan 200 berita lembaga yang wajib dipublikasikan oleh Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten/kota yang ada di Bangka Belitung.

Target ini disampaikan Dewi, guna menjaga eksistensi Bawaslu di Babel pasca tidak adanya tahapan pemilu maupun pilkada yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 mendatang, "Berdasarkan masukan Bawaslu RI kita ditargetkan 200 berita dalam setahun, berarti paling tidak ada 1 berita dalam sehari yang harus kita publikasikan", ucap Anggota Bawaslu Babel yang membidangi Divisi Hukum, Humas dan Datin.

Ia juga memaparkan arah dan tujuan humas Bawaslu

kedepan untuk menyambut tahapan pemilu yang diperkirakan akan berlangsung tahun depan, seperti keaktifan media sosial resmi lembaga hingga kreativitas Tim Humas pada Bawaslu kabupaten/kota, "Humas harus kreatif ditengah non tahapan seperti saat ini, kami mengapresiasi juga ragam konten yang digunakan sebagai sarana publikasi dan sosialisasi", paparnya.

Sementara Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan mengatakan Humas sangat berperan penting dalam eksistensi kelembagaan Bawaslu di Babel, terlebih lagi saat ini Bawaslu belum memasuki tahapan Pemilu yang direncanakan akan berjalan pada Tahun 2022 mendatang, "Peran Humas sangat penting untuk mempublikasikan apa yang dilakukan Bawaslu

selama non tahapan ini, karena citra Lembaga kita harus kita jaga dalam pengawasan pemilu ini," jelas Edi.

Edi menilai humas sangat berpengaruh terhadap eksistensi Bawaslu dimata publik, bahkan dalam paparannya, Ketua Bawaslu Babel ini mengajak jajaran Bawaslu mengevaluasi kinerja dan kerjasama lembaga untuk kembali dipublikasikan oleh humas Bawaslu kepada masyarakat. Ia menekankan agar Humas Bawaslu dapat memaksimalkan perannya demi menciptakan eksistensi Bawaslu kepada publik, terlebih lagi Bawaslu RI telah menyampaikan fokus publikasi yang harus dimuat oleh Humas Bawaslu yakni meliputi eksistensi Bawaslu, konten yang mengedukasi dan konten yang bersifat penguatan demokrasi.



Ketua Bawaslu Babel Edi Irawan (tengah) saat menyampaikan arahan terkait eksistensi Bawaslu dalam menjalin kerjasama dengan mitra Bawaslu di Ruang rapat Sekretariat Bawaslu Belitim Kamis, (03/06/2021)

EDI MINTA BAWASLU BELTIM JAGA EKSISTENSI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Edi Irawan meminta Bawaslu Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menginventarisir hasil evaluasi terhadap kerjasama dengan mitra Bawaslu.

Hal itu dilakukan untuk menjaga eksistensi Bawaslu dalam menjalin kerjasama kepada lembaga persiapan menyambut tahapan Pemilu pada tahun 2024 mendatang. "jadi bisa diseleksi untuk menilai lembaga, ormas atau komunitas mana saja yang bisa tetap diajak kerjasama ataupun yang akan diajak kerjasama", jelas Ketua Bawaslu Babel ini saat membuka agenda Monitoring dan Evaluasi Humas dan Hubal Bawaslu Babel di ruang rapat Bawaslu

Belitung.

Ketua Bawaslu Babel meminta agar jajaran Bawaslu Belitung dan Belitung Timur mengevaluasi dengan mitra mana saja yang akan dilakukan kerjasama kedepannya, "mulai sekarang bisa diseleksi untuk menilai lembaga, ormas atau komunitas mana saja yang bisa tetap diajak kerjasama ataupun yang akan diajak kerjasama", jelasnya. Ia melanjutkan paparnya bahwa kerjasama Bawaslu tidak harus terfokus pada lembaga yang formal namun juga bisa yang non formal yang tujuannya adalah untuk edukasi politik bagi masyarakat, sehingga dapat menjaga eksistensi Bawaslu di mata masyarakat dan memberikan Pendidikan politik bagi

masyarakat. Lebih jauh ia menjelaskan meski saat ini tidak ada tahapan, namun beberapa dari mitra kerjasama tersebut dapat dilakukan kerjasama yang lebih lanjut untuk keterbukaan informasi terhadap publik. Kerjasama tersebut atas pertimbangan relevansi Lembaga yang dapat mendukung kerja Bawaslu. Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini juga dibahas inventaris Kerjasama yang telah dilakukan oleh Bawaslu Belitung dan Belitung Timur, dalam kegiatan tersebut juga disampaikan rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait kerjasama yang telah disusun oleh Bawaslu Provinsi Bangka Belitung untuk mendapat masukan dari jajaran di Kabupaten/Kota di Bangka Belitung.



Ketua dan Anggota Bawaslu Babel saat menghadiri kegiatan terkait eksistensi Bawaslu dalam menjalin kerjasama dengan mitra Bawaslu di Ruang rapat Sekretariat Bawaslu Belitim.



Foto bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Babel, Kepala Sekretariat Bawaslu Babel dengan Rektor dan Jajaran Universitas Bangka Belitung

BAWASLU & UBB LAKUKAN PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN Pemanfaatan Ruang Opini Publik Website Bawaslu Babel

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) terkait dengan pemanfaatan ruang opini publik pada website resmi Lembaga Bawaslu Babel.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani langsung oleh kedua belah pihak yakni Dr. Ibrahim, Sfil., Msi., selaku Rektor UBB dan Edi Irawan, S.Ag., M.H., selaku Ketua Bawaslu Babel, hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 di Gedung Rektorat UBB.

Dengan adanya Nota Kesepahaman ini diharapkan seluruh mahasiswa UBB dapat memanfaatkan ruang opini tersebut untuk menulis karyanya baik berupa opini melalui website resmi Bawaslu Babel, “Diharapkan

kedepannya dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung berkembangnya ruang publik yang ada di website Bawaslu,” ucap Edi Irawan saat menyampaikan sambutannya.

Acara yang diselengi dengan Sosialisasi PPID ini juga menyasar dua Fakultas di UBB yakni Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk aktif dalam memanfaatkan ruang opini publik ini dalam mengasah kemampuan menulis mahasiswa. Bahkan ia berharap kerjasama ini tidak hanya dimanfaatkan oleh Fakultas tertentu, melainkan tingkat Universitas, “Jadi kita tidak hanya bekerjasama dengan fakultas tertentu saja pada UBB namun secara terbuka pada tingkat universitasnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu Ketua Bawaslu Babel ini membeberkan bahwa pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 akan dimulai pada tahun 2022 mendatang, sehingga pihaknya sangat membutuhkan publik untuk turut mengawasi tahapan Pemilu dan Pilkada di Bangka Belitung, “Tahapan Pemilu akan dilakukan di awal atau pertengahan tahun 2022, tentu saja kerjasama ini akan membantu kerja Bawaslu untuk tahapan pemilu dan pilkada kedepannya,” tutup Edi.



Penandatanganan MoU oleh Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan dan Rektor Universitas Bangka Belitung Dr. Ibrahim



Arahan Anggota Bawaslu Babel Dewi Rusmala Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin terkait PPID Bawaslu Babel

Bawaslu Babel menggelar sosialisasi PPID kepada mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Bangka Belitung (UBB), Selasa 15 Juni 2021.

Kegiatan ini dilakukan guna meningkatkan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Agenda yang berlangsung di Gedung Rektorat UBB ini turut menghadirkan Ibrahim

selaku Rektor UBB, Syawaludin Ketua Komisi Informasi Daerah Babel dan Dewi Rusmala Anggota Bawaslu Babel sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut.

Dalam paparannya Anggota Bawaslu Babel Dewi Rusmala berharap PPID Bawaslu Babel dapat dimanfaatkan mahasiswa sebagai sarana pengumpulan data dalam proses akademik perkuliahan di UBB, "Banyak sekali kasus atau masalah pemilihan yang datanya dimiliki oleh Bawaslu

yang dapat dijadikan bahan untuk mahasiswa dalam menyusun tugas akhir," ujar Dewi saat memaparkan materinya. Srikandi Bawaslu Babel ini juga menjelaskan bahwa segala bentuk permohonan informasi ke Bawaslu Babel tidak dikenakan biaya apapun, baik permohonan yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi kantor Bawaslu Babel maupun secara tidak langsung melalui website PPID Bawaslu Babel, Aplikasi PPID



Dewi Rusmala (Anggota Bawaslu Babel)

Gelar Sosialisasi PPID Ke UBB, Dewi Berharap PPID dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Akademik

Bawaslu Babel dan Whatsapp PPID Bawaslu Babel, "Misal ada yang ingin datang ke Bawaslu untuk meminta data atau untuk lebih paham terkait PPID dipersilahkan dan dapat diakses secara gratis atau bebas biaya," terangnya. Dalam kesempatan itu ia juga menyampaikan peran mahasiswa dalam proses pilkada dan pemilu, menurutnya mahasiswa bisa berperan sebagai pemantau pemilu, pasalnya pada pelaksanaan pemilu dan pilkada lalu belum ada pemantau pemilu

yang memiliki legalitas sah untuk membantu Bawaslu dalam mengawal setiap proses demokrasi di Bangka Belitung. Ia berharap dengan adanya agenda sosialisasi PPID ini, mahasiswa UBB dapat memanfaatkan layanan PPID untuk mencari dan mengumpulkna data pemilihan, bahkan ia berharap mahasiswa yang telah mendapatkan sosialisasi PPID dapat melanjutkan informasi layananana PPID ini kepada mahasiswa lain sebagai sumber data dan informasi Bawaslu Babel.

Anggota Bawaslu Babel Jafri (tengah) bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka saat mengisi acara Rapat Teknis Penguatan Kajian Penanganan Pelanggaran.

MESKI TANPA TAHAPAN PEMILU, JAFRI INGATKAN JAJARAN BAWASLU JAGA RITME BEKERJA

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus mengasah kemampuan dan kapasitas jajarannya dalam melakukan penanganan pelanggaran dengan menyelenggarakan kegiatan Rapat Teknis Penguatan Kajian terkait Penanganan Pelanggaran.

Kali ini, Bawaslu Kabupaten Bangka yang didapuk sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Kamis, 06 Mei 2021, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Bangka.

Anggota Bawaslu Babel, Jafri dalam arahannya menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ritme kerja Pengawas Pemilu selama non-tahapan Pilkada dan Pemilu.

"Ini merupakan kegiatan rutin yang

dilaksanakan oleh Bawaslu Babel untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia khususnya di Divisi Penanganan Pelanggaran, walaupun Pilkada dan Pemilu baru akan dilaksanakan di tahun 2024, ujar Jafri yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Babel.

Menurutnya jajaran Bawaslu harus mulai mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menyongsong momentum besar Pemilu Tahun 2024 mendatang agar dapat mengkaji dan menganalisis kasus atau putusan pengadilan terkait penanganan pelanggaran. Senada dengan itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka Irwandi Pasha mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat

menjawab tantangan bagi Pengawas Pemilu yang mungkin akan menghadapi isu dan permasalahan yang lebih kompleks dalam hal penanganan pelanggaran di Pemilu Serentak 2024, sebab dua rezim yang berbeda yakni Pemilu dan Pilkada akan dilaksanakan secara serentak.

"Kami berharap peserta yang hadir dapat berdiskusi aktif karena mungkin kedepannya kita juga akan menghadapi permasalahan yang lebih kompleks," imbuhnya.

Untuk diketahui, kegiatan ini dilaksanakan secara roadshow dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai tuan rumah dengan peserta yang terbatas mengingat kondisi pandemi Covid-19.

Penyelesaian sengketa merupakan kewenangan yang diamanahkan oleh Undang-Undang kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku penyelenggara pemilihan umum (pemilu), hal tersebut tertuang dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan (UU Pemilihan), dan dalam Pasal 93 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Lebih lanjut Bawaslu mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Perbawaslu 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu.

Dalam mengajukan permohonan sengketa, terhadap keterpenuhan syarat formil dan

dapat memahami bagaimana tata cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis dalam melakukan penyelesaian sengketa haruslah memiliki standar kualifikasi, apa saja yang harus dilakukan dalam setiap tahapannya, dan tidak semua orang memiliki kualifikasi dan memahami untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa. Langkah teknis yang harus dilakukan dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa tertuang dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP). Terkait dengan hal ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan Supervisi dan



Firman T. B. Pardede (Anggota Bawaslu Babel)
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

KESIAPAN BAWASLU BABEL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU/PEMILIHAN Firman Lakukan Sosialisasi SOP Ke Bawaslu Kabupaten/Kota

materil dilakukan pengecekan oleh Bawaslu sebelum dilakukan registrasi, untuk itu pemohon haruslah melengkapi semua syarat tersebut agar laporan dapat ditindaklanjuti. Secara sederhana penyelesaian sengketa pemilu dan pemilihan memiliki perbedaan, yakni dalam pemilu terdapat mekanisme mediasi dan adjudikasi, sedangkan dalam pemilihan terdapat mekanisme musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka.

Bawaslu wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam melakukan penyelesaian sengketa, mulai dari tahapan penerimaan permohonan hingga pasca putusan dibacakan. Dalam hal ini Bawaslu Republik Indonesia sudah melakukan bimbingan teknis terkait penyelesaian sengketa kepada jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia, sehingga seluruh jajaran Bawaslu

Monitoring kepada seluruh jajarannya di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota, dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan SOP penyelesaian sengketa.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Bulan Maret 2021. Dalam supervisi tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan dan mengecek SOP yang dimiliki oleh jajaran Bawaslu di 7 (tujuh) kabupaten/kota sudah sesuai atau tidak dengan format dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan draft SOP untuk dimintakan pendapat, tanggapan dan masukan dari jajaran Bawaslu di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota guna penyederhanaan dan penyempurnaan SOP tersebut agar dapat dipahami dengan mudah serta dilakukan penyeragaman pada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung.

Hal ini merupakan bentuk kesiapan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024, yang menghadirkan pemilu dan pemilihan pada waktu yang sama, sehingga diharapkan dengan adanya SOP yang relevan dan mudah dipahami, akan memberikan kemudahan bagi jajaran Bawaslu untuk melakukan penyelesaian sengketa. Kedepannya Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melakukan peningkatan kualitas, bimbingan teknis, serta supervisi dan monitoring kepada seluruh jajaran di 7 (tujuh) Kabupaten/ Kota, serta melakukan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh stakeholder guna memaksimalkan persiapan dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yang tahapannya sudah akan dimulai pada tahun 2022.

Testimoni Stakeholders

Di masa jeda menuju Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang akan datang, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tampaknya tak mau lengah. Beberapa kegiatan yang sifatnya edukatif, evaluatif, dan promotif terus berjalan, salah satunya dengan menggandeng kalangan kampus untuk sama-sama berkontribusi dalam kegiatan yang sifatnya memperluas gagasan tentang demokrasi. Memang, urusan demokrasi tak sekedar urusan elektoral, lebih luas ada proses *deepening democracy* (pendalaman demokrasi) yang menjadi tugas bersama kita semua. Pada dimensi yang lebih luas, Bawaslu memperteguh posisinya sebagai pendorong kuat bagi semakin inklusifnya dunia politik hari-hari ini.

Ibrahim, (Associate Professor Bidang Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung)



Alhamdulillah Bawaslu telah sukses dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 4 Kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung. Pekerjaan rumah berikutnya tentu terus melakukan evaluasi dan konsolidasi secara vertikal maupun horizontal dengan semua stakeholder penyelenggara Pemilu guna mempersiapkan tahapan demi tahapan menuju Pileg, Pilkada dan Pilpres serentak 2024. Tentu tantangannya akan lebih beragam, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 butuh strategi, sinergi, dan formula yang tepat untuk menghasilkan pesta demokrasi yang Luber dan Jurdil. Peningkatan kesadaran kepada publik bahwa pengawasan menjadi tugas dan tanggungjawab bersama harus kontinyu dilakukan dengan banyak cara melalui berbagai media dan simpul-simpul komunitas baik dikota maupun pedesaan.

Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum UBB).

Dengan statusnya sebagai lembaga negara yang permanen berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu tidak boleh berhenti menunjukkan kinerjanya pasca Pemilu 2020. Bawaslu yang jabatannya 5 tahun ini bertanggungjawab secara berkesinambungan melakukan penguatan masyarakat dalam berdemokrasi, dan mendorong budaya kesadaran masyarakat untuk menegakkan keadilan pemilu. Dalam kegiatan teknisnya Bawaslu dapat melakukan kerja-kerja kreatif seperti melakukan penelitian, sosialisasi ke lapisan masyarakat, membangun jaringan sinergisitas dengan berbagai Lembaga, dan melakukan penguatan masyarakat hingga perbaikan data pemilih sebagai kontribusi terhadap perbaikan administrasi kependudukan. Bawaslu juga strategis melakukan kajian mendalam tentang kondisi dan perilaku pemilih sebelum atau sesudah Pemilu, hal ini untuk mendeteksi aspek-aspek sosial dan politik, lingkungan dan struktural dalam menjunjung pemilu yang adil dan akuntabel dan menjadi landasan strategis program pengawasan yang tepat pada pemilu 2024. **Syawaludin, M.H. (Ketua Komisi Informasi Daerah Prov. Kep. Babel)**



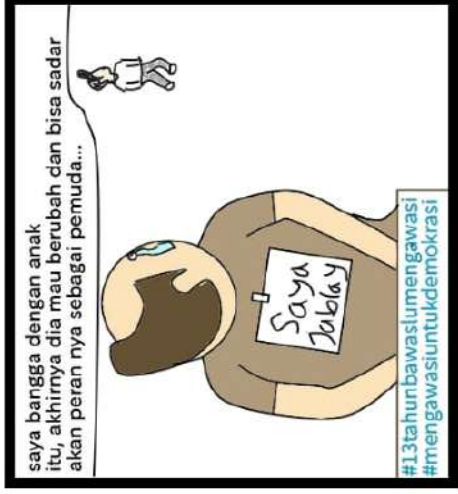
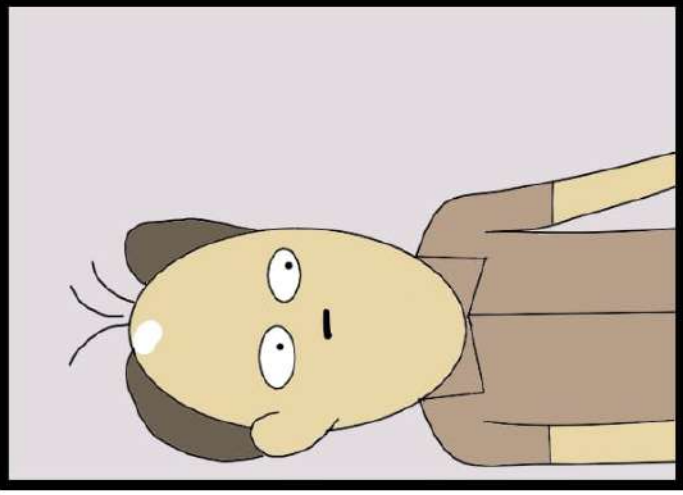
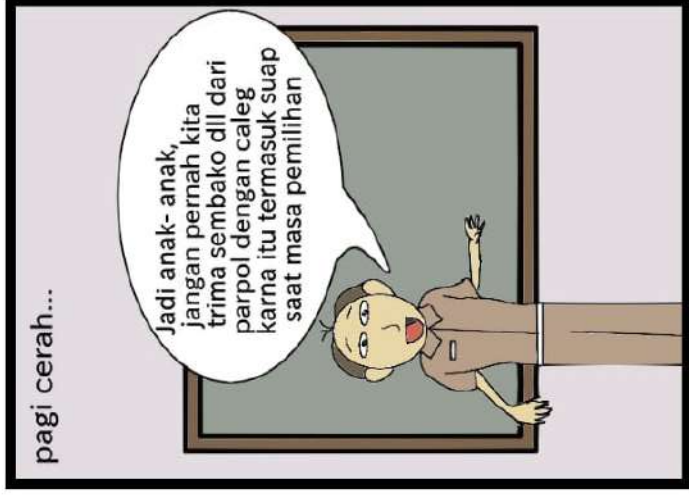
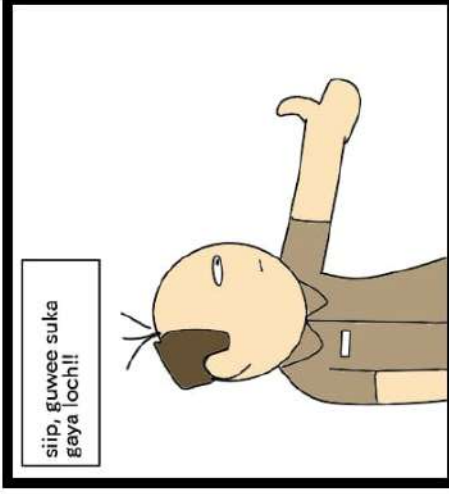
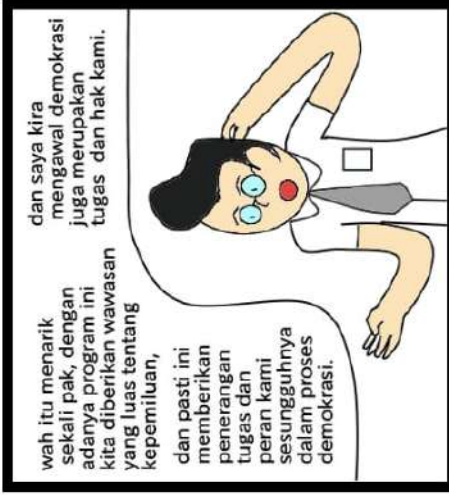
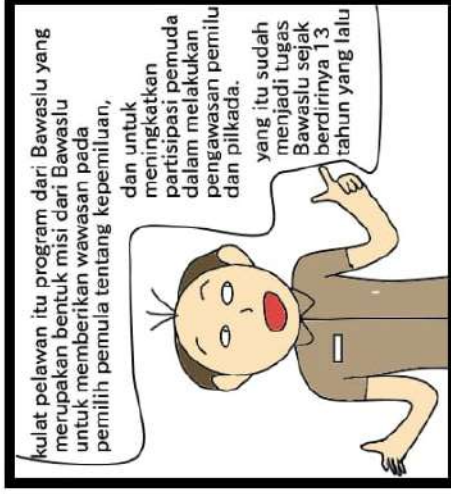
Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tampak semakin edukatif dalam mentransformasikan kultur pengawasan. Kinerjanya pra dan pasca pilkada serentak kemarin, tak bisa dipandang sebelah mata. Semangat atau tekad "No-MK," adalah bagian prestasi pengawasan yang patut diapresiasi.

Masmuni Mahatma (Ketua PW GP ANSOR Kep. Babel)

Kalau kita bicara tentang Bawaslu menarik untuk mereview kembali beberapa isu serta kontroversi seputar perubahan kelembagaan dan perjalanan proses tahapan Pemilu 2019 dalam rangka menegakkan kredibilitas dan marwah lembaga, mengurai beberapa hal yang menurut hemat penulis perlu untuk kita tahu dan tidak dilupakan begitu saja pasca pelaksanaan da tahun 2019 yang lalu terkhusus di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kredibilitas lembaga bagi Bawaslu adalah bagaimana menjaga kehormatan lembaga yang dilahirkan dan memahami bahwa sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tidak hanya sekedar menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu, tetapi menjaga kehormatan sebagai lembaga yang netral dari kepentingan politik praktis dari kubu atau kelompok manapun, serta bersikap kredibel dalam segala putusan-putusan (baik Administrasi Pemilu maupun Sengketa Pemilu) yang di keluarkannya. Tentu saja, hal dimaksud adalah agar kehormatan lembaga tetap dan terus dapat dipercaya oleh masyarakat secara umum yang dalam bingkainya kita sebut Rakyat Indonesia. Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu bahwa lembaga Bawaslu sudah melaksanakan tugasnya secara adil dan jujur sebagai cerminan dari sikap Independen. Sedangkan secara kredibilitas Bawaslu sudah senantiasa menjaga nilai atau kehormatan lembaga Bawaslu yang bersikap prosedural dan substanti dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberi keadilan pemilu.

Andika Saputra, SH.MH. (Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Babel).





"Harum Mewangi Bunga Melati
Indah Terselip Di Daun Telinga
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H
Mohon Maaf Atas Segala Khilap & Salah"



**KELUARGA BESAR BAWASLU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



Mengucapkan
Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1442H
Mohon Maaf Lahir & Bathin

